KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Mufakat atau Voting
Tanggal : Kamis, 20 Juli 2017
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 12

PUTUSAN RUU PEMILU

Mufakat atau Voting?

JAKARTA — Jika tidak ada aral melintang, DPR akan mengambil keputusan atas Rancangan Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu pada Kamis (20/7). Pemerintah ingin agar putusan diambil yang terbaik dan mampu menyederhanakan sistem politik nasional.

Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa apapun keputusan yang akan diambil DPR pada hari ini terkait dengan RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) harus dihargai dan menjadi wilayah kerja dari parlemen.

Akan tetapi, Presiden juga menaruh harapan supaya rapat paripurna DPR dapat menyetujui usulan Pemerintah mengenai ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden sebesar 20%.

"Pemerintah dalam hal ini pengajuannya, karena dari pengalaman beberapa kali Pemilu *kan* sudah 20% berjalan baik," kata Presiden seusai membuka Rapat Kerja Nasional X Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center, Rabu (19/7).

Dia menyatakan Pemerintah tetap ingin sistem politik menganut ambang batas capres atau *presidential threshold* sebesar 20% adalah untuk membuat sistem pemilihan menjadi kian sederhana pada masa depan.

"Semakin sederhana, semakin turun. Tetapi kita juga tahu, jangan sampai ada partai yang dirugikan. Tapi itu wilayahnya DPR."

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto memastikan seluruh anggota fraksinya ikut memberikan suara jika pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara atau voting terkait dengan lima isu krusial RUU Pemilu.

"Kan anggota kita ada 109. Itu mengumpulkan enggak mudah. Mereka kan tokoh ada kegiatan di daerah. Kita pastikan mereka semua hadir besok," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Rabu (19/7).

Utut menambahkan PDIP siap mengikuti paripurna, terutama kalau keputusannya diambil melalui voting.

Dia menegaskan masih ada proses lobi yang terus dilakukan sebelum akhirnya diputuskan untuk voting.

Politisi Partai Gerindra, Nizar Zahro mengatakan partainya akan tetap konsisten untuk tidak menyetujui adanya *presidential threshold*.

Menurutnya, ambang batas tidak relevan dalam upaya pengembangan demokrasi. ***(Arys Aditya/John A. Oktaveri)***